

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA
UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP)
TAHUN 2016

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan Akreditasi terhadap LPP PBJ;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kualitas Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan maka perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelaksana Pelatihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang penetapan status akreditasi Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan (LPP) Tahun 2016.

- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa;
- f. Berita Acara Rapat Pleno Akreditasi Nomor 01/BA/PA/D32/05/2016;
- g. Berita Acara Rapat Komite Sertifikasi Nomor 2413/BA/KS/LKPP/05/2016;
- h. Berita Acara Rapat Pleno Akreditasi Nomor 02/BA/PA/D32/06/2016;
- i. Berita Acara Rapat Pleno Akreditasi Nomor 03/BA/PA/D32/07/2016;
- j. Berita Acara Rapat Komite Sertifikasi Nomor 2413/BA/KS/LKPP/07/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP) TAHUN 2016.**

KESATU : Penetapan Status Akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini;

KEDUA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud dalam lampiran II keputusan ini hanya dapat menyelenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pelayanan peserta internal LPP tersebut;

- KETIGA : Penetapan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ yang telah Terakreditasi pada penetapan Tahun 2014 – 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA memperoleh sertifikat yang berlaku sesuai dengan peringkat akreditasinya;
- KELIMA : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Oktober 2016

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
 SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
 PENETAPAN STATUS AKREDITASI
 PROGRAM PELATIHAN DAN
 PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI
 KEAHLIAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI
 LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN
 (LPP) TAHUN 2016.
 NOMOR : 60 TAHUN 2016
 TANGGAL : 5 Oktober 2016

**DAFTAR LPP PBJ
 TERAKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN
 SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
1.	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi (LPKN)	Jakarta Timur DKI Jakarta	Terakreditasi A	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2021
2.	Diponegoro Smart Solution	Semarang Jawa Tengah	Terakreditasi A	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2021
3.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali	Denpasar Bali	Terakreditasi A	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2021
4.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKPP) Prov. NTB	Mataram Nusa Tenggara Barat	Terakreditasi B	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2020
5.	Laboratorium Pengkajian dan Pengembangan Akuntansi Perpajakan dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomi & Bisnis (LPPAPSI FEB) Universitas Airlangga	Surabaya Jawa Timur	Terakreditasi B	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2020
6.	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Madani (LP2M)	Batam Kepulauan Riau	Terakreditasi B	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2020
7.	Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (DPD IAPI Jawa Timur)	Surabaya Jawa Timur	Terakreditasi B	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2020
8.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung	Terakreditasi B	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2020

NO	NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
9.	Icon Training Center	Jakarta Barat DKI Jakarta	Terakreditasi B	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2020
10.	Lembaga Kajian Indonesia (LKI)	Pekanbaru Riau	Terakreditasi B	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2020
11.	Lembaga Training Keuangan dan Pengadaan Indonesia (LTKPI)	Serang Banten	Terakreditasi B	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2020
12.	Pusat Kajian dan Studi Kebijakan Publik (PKSKP)	Kota Baru Jambi	Terakreditasi B	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2020
13.	Pusat Pengembangan Manajemen Pengadaan Indonesia (PPMPI)	Tangerang Banten	Terakreditasi C	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2019
14.	Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pemerintahan (LPKP)	Jakarta Utara DKI Jakarta	Terakreditasi C	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2019
15.	Pusat Riset Pendidikan dan Pelatihan (PUREH)	Banda Aceh Aceh	Terakreditasi C	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2019
16.	Lembaga Manajemen Indonesia (LEMINDO)	Bandung Jawa Barat	Terakreditasi C	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2019
17.	Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah	Palembang Sumatera Selatan	Terakreditasi C	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2019
18.	Sciencom	Jakarta Selatan DKI Jakarta	Terakreditasi C	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2019
19.	Lembaga Pemberdayaan Rakyat Nusantara (L-Peran)	Makassar Sulawesi Selatan	Terakreditasi D	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2018

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Oktober 2016

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI
PROGRAM PELATIHAN DAN
PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI
KEAHLIAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI
LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN
(LPP) TAHUN 2016.
NOMOR : 60 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 Oktober 2016

**DAFTAR LPP PBJ
TERAKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PELAYANAN PESERTA INTERNAL**

NO	NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
1.	Balai Diklat Keuangan Manado	Kota Manado Sulawesi Utara	Terakreditasi A	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2021
2.	Balai Diklat Keuangan Denpasar	Denpasar Bali	Terakreditasi A	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2021
3.	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	Pekanbaru Riau	Terakreditasi B	1 Oktober 2016 – 1 Oktober 2020

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Oktober 2016

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
 SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
 PENETAPAN STATUS AKREDITASI
 PROGRAM PELATIHAN DAN
 PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI
 KEAHLIAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI
 LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN
 (LPP) TAHUN 2016.

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TANGGAL : 5 Oktober 2016

**DAFTAR PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LPP PBJ YANG TELAH
 TERAKREDITASI PADA PENETAPAN TAHUN 2014 – 2015**

NO	NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI	Jakarta Selatan DKI Jakarta	Terakreditasi A	31 Desember 2016
2.	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	Bogor Jawa Barat	Terakreditasi A	31 Desember 2016
3.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Kemenkeu	Gadog Ciawi Jawa Barat	Terakreditasi A	31 Desember 2016
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum Wil. IV Bandung	Bandung Jawa Barat	Terakreditasi A	31 Desember 2016
5.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY	Bantul Yogyakarta	Terakreditasi A	31 Desember 2016
6.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten	Pandeglang Banten	Terakreditasi A	31 Desember 2016
7.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak Kalimantan Barat	Terakreditasi A	31 Desember 2016
8.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru Kalimantan Selatan	Terakreditasi A	31 Desember 2016
9.	PPM Manajemen	Jakarta Pusat DKI Jakarta	Terakreditasi A	31 Desember 2016
10.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum Wil. VIII Makassar	Makassar Sulawesi Selatan	Terakreditasi A	31 Desember 2016
11.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Reg. IV Yogyakarta	Bantul DIY	Terakreditasi A	31 Desember 2016

NO	NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
12.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Riau	Pekanbaru Riau	Terakreditasi A	31 Desember 2016
13.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Reg. VII Makassar	Makassar Sulawesi Selatan	Terakreditasi A	31 Desember 2016
14.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu	Padang Kemiling Bengkulu	Terakreditasi A	31 Desember 2016
15.	LKPM IPWI (Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia)	Bogor Jawa Barat	Terakreditasi A	31 Desember 2016
16.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum Wil. IX Surabaya	Surabaya Jawa Timur	Terakreditasi A	31 Desember 2016
17.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Jenderal Soedirman	Purwokerto Jawa Tengah	Terakreditasi B	31 Desember 2016
18.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Semarang	Semarang Jawa Tengah	Terakreditasi B	31 Desember 2016

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 5 Oktober 2016

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI